BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dunia merupakan dua arus yang saling mempengaruhi atau memperkuat satu dengan yang lainnya, yang saat ini sedang menghadang dunia. Dan kedua arus tersebut akan semakin kuat pada masa yang akan datang, seiring dengan kemajuan teknologi serta peningkatan pendapatan perkapita dan pertambahan jumlah penduduk dunia. Secara sederhana globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana semakin banyak negara di dunia yang terlibat langsung dengan kegiatan ekonomi dunia atau produksi dunia.

Munculnya dua arus ini mengubah tatanan perekonomian dan perdagangan dunia yang akan berpengaruh sangat kuat terhadap setiap negara, terutama yang menerapkan kebijakan perdagangan bebas atau ekonomi terbuka. Integrasi perdagangan antar negara meningkat pesat terutama pada tahun 1970-an, pada saat itu banyak negara mulai menerapkan sistem ekonomi terbuka yang di sebut era keterbukaan global. Akan tetapi, tidak semua negara mengalami laju pertumbuhan perdagangan internasional yang sama. Ada negara yang mengalami pertumbuhan perdagangan luar negeri yang pesat, tetapi banyak negara yang tidak dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang muncul dari pertumbuhan perdagangania dunia. Dalam perkembangan ekonomi internasional, perdagangan merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan

kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Jika suatu negara ingin makmur maka perdagangan dunia merupakan salah satu cara untuk mencapainya, selain itu perdagangan dunia mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga hubungan kerjasama antar negara maju dengan negara berkembang terutama di bidang ekonomi. Di era perdagangan bebas hampir semua negara berusaha untuk meningkatkan kapabilitas negaranya dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Salah satu cara yang di tempuh oleh negara tersebut adalah dengan melakukan aktivitas perdagangan internasional dimana terjadi ekspor dan impor barang keluar batas negara yang didasarkan pada prinsip perdagangan bebas. Negara-negara yang terlibat dalam proses perdagangan ini sering mengalami hambatan yang dapat ketika negara tersebut harus berhadapan dengan hukum suatu negara yang tidak sesuai dengan aturan hukum dagang di negara lain (Arifin, 2007:130).

Dalam rangka menjalin suatu kondisi perdagangan yang adil dan saling menguntungkan semua pihak, negara maju yang di prakarsai oleh AS mengajukan untuk di bentuknya suatu organisasi perdagangan dunia *World Trade Organisation*. WTO di harapkan dapat berfungsi sebagai organisasi perdagangan yang mampu menciptakan suatu kondisi perdagangan dunia. Hal inilah yang mendorong lahirnya *World Trade Organization* (WTO). Melalui WTO dilahirkan konsep tata aturan perdagangan dunia yang terbuka dengan meniadakan tindakan proteksi setiap negara anggota sehingga perdagangan dunia tidak di berlakukan lagi tarif dan bea masuk serta hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Kini hampir seluruh negara-negara di dunia menjadi anggota WTO. Pada tanggal 1

Januari 1995 *World Trade Organization* (WTO) secara resmi berdiri. WTO adalah organisasi perdagangan dunia penerus *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) pada tahun 1947. Perbedaaan GATT dengan WTO adalah bahwa GATT hanya merupakan sekumpulan peraturan perdagangan yang apabila terjadi sengketa antar anggota maka GATT tidak dapat menyelesaikannnya, karena dalam GATT tidak terdapat lembaga penyelesaian sengketa. Sedangkan pada WTO selain sebagai forum negosiasi bagi anggota juga terdapat lembaga penyelesaian sengketa. Lembaga ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antar anggota WTO. Sementara itu prinsip GATT dan WTO adalah sama yaitu *Most Favoured Nation* (MFN) atau perlakuan yang sama bagi setiap anggota WTO (Alfonso, 1989:18-28).

Lahirnya *World Trade Organization* (WTO) menandakan lahirnya babak baru bagi perdagangan antar negara-negara didunia. WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara-negara dimana sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui persetujuan yang berisikan aturan-aturan dasar perdagangan internasional. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antara negara anggota yang mengikat pemerintah negara untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan. Aturan-aturan yang telah disepakati di dalam WTO tersebut meliputi berbagai macam hal yang berkaitan dengan perdagangan internasional, salah satunya adalah mengenai investasi atau penanaman modal. Salah satu persetujuan dalam WTO yang didalamnya mengatur masalah terkait dengan investasi adalah Perjanjian TRIMs.

Perjanjian TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan. Kesepakatan TRIMs dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan investasi antar negara. Tujuan utama TRIMs adalah untuk menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota dalam hubungannya dengan investasi asing dan mencegah proteksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip GATT. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar perundingan yang mengarahkan negara-negara penerima modal mengatur investasi asing di negara tersebut. TRIMs melarang pengaturan-pengaturan penanaman modal asing yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GATT 1994. Negara berkembang berpendapat bahwa modal asing dapat memberi modal kerja dan mendatangkan keahlian manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar. Penanaman modal asing dapat pula berperan dalam meningkatkan pendapatan mata uang asing melalui aktivitas ekspor oleh perusahaan multinasional (*Multinational Enterprise)* MNE. Yang juga penting, penanaman modal asing (PMA) tidak melahirkan utang baru. Selain itu negara penerima tidak perlu merisaukan atau menghadapi risiko manakala suatu PMA yang masuk negerinya ternyata tidak mendapatkan untung dari modal yang ditanamnya (Fennel dan Tyler, 1995: 2003).

Pada dasarnya investasi merupakan pembentukan modal yang mendukung peran swasta dalam perekonomian. Menurut Harrod Domar, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal seperti penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Penanaman modal asing langsung merupakan investasi yang dilakukan oleh swasta asing ke suatu negara tertentu. Bentuknya dapat berupa cabang perusahaan multinasional, lisensi, dan lain-lain. Investasi luar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi daripada penghasilan yang diterima dengan investasi yang sebanding di dalam negeri. Investasi luar negeri langsung dalam bentuk fisik di dalam pabrik manufaktur yang baru dan cabang-cabang penjualan bagi pengusaha multinasional. Investasi di harapkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian negara-negara berkembang (Suyatno, 2003:72).

Karena terbatasnya dana yang dimiliki negara-negara berkembang, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi maka peran investasi dari luar negeri (PMA) sangat di harapkan. *Foreign Direct Investment* (FDI) dipandang sebagai cara yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Melalui FDI, modal asing dapat memberikan kontribusi yang lebih baik kedalam proses pembangunan (Mashayekhi dan Gibbs, 1999:33).

Pada umumnya, persyaratan penanaman modal dapat digolongkan kedalam dua bentuk. Pertama, persyaratan masuk (*entry requirement*) dan kedua, persyaratan operasional (operational requirement). Kebijakan negara-negara menunjukkan bahwa pada umumnya negara-negara menerapkan kedua bentuk persyaratan tersebut sebagai syarat untuk masuknya modal asing ke negaranya. Pada tahap pertama, yaitu persyaratan masuk (*entry requirement*), biasanya badan penanaman modal dari negara penerima memeriksa apakah usulan atau proposal penanaman modal asing sesuai atau cocok dengan tujuan-tujuan pembangunan negaranya. Pertimbangan lainnya, apakah proposal tersebut memberikan

keuntungan kepada negara penerima. Karena itu, manakala negara penerima setelah memeriksa suatu proposal PMA beranggapan bahwa proposal tersebut tidak memenuhi persyaratan masuk atau persyaratan kebijakan penanaman modal nasionalnya, maka pemerintah tersebut dapat menolak permohonan penanaman modal. Sebaliknya, manakala pemerintah negara penerima beranggapan bahwa suatu usulan PMA memenuhi persyaratan untuk masuknya suatu penanaman modal, maka negara yang bersangkutan akan menerapkan persyaratan yang kedua, yaitu persyaratan operasional atau persyaratan pelaksanaan (*operational* atau *performance requirements*). Ruang lingkup persyaratan-persyaratan ini cukup luas, bergantung kepada tujuan atau kebijakan masing-masing negara.

Namun demikian persyaratan pelaksanaan yang paling umum adalah persyaratan menggunakan kandungan local (*local content requirements*), persyaratan perdagangan yang berimbang (*trade balancing requirements*) persyaratan ekspor (*export performance requirements*), pembatasan impor (*limitation on imports*), persyaratan mata uang asing dan pengiriman mata uang asing (*foreign exchange and remittance requirements*), persyaratan modal minimum (*minimum local equity requirements*), persyaratan alih teknologi (*technology transfer requirements*), dan persyaratan lisensi produk (*product licensing requirements*) (Sornarajah :100).

China adalah salah satu negara yang memiliki posisi penting dalam dunia internasional. Pada awal berdirinya di tahun 1949, perekonomian China menganut sistem sosialis dan hubungan perdagangan internasionalnya hanya dilakukan dengan negara-negara yang memiliki sistem yang sama. Namun setelah Mao

Zedong meninggal dan kepemimpinannya digantikan oleh Deng Xioping pembangunan negara China dilakukan dengan melakukan reformasi dan keterbukaan terhadap dunia luar. Sistem perekonomian China berubah dari sistem sosialis menjadi sistem kapitalis. Pemerintah China pada masa Deng Xioping merasa perlu mengadakan perubahan didalam membuat kebijakan terutama pada bidang ekonomi karena adanya kebutuhan modal asing bagi pembangunan ekonomi China. Upaya untuk menyerap investasi asing masuk ke China, pemerintah membuat kebijakan membuka diri *(opening up)*,

Kebijakan membuka diri terhadap dunia internasional sangat berpengaruh terhadap proses modernisasi China. Modernisasi China memerlukan input dalam jumlah besar, meliputi modal , teknologi, prasarana dan manajemen modern yang lebih maju. Cara terbaik untuk menyerap semua itu adalah dengan meningkatkan hubungan China dengan seluruh negara dunia, memperluas perdagangan luar negerinya, serta menerima investasi asing. Keanggotaan China didalam WTO merupakan pernyataan politik dan komitmen dari pemerintah China. Keputusan China untuk bergabung dengan WTO merupakan langkah yang sangat tepat. Karena China tidak memiliki modal yang besar dan keahlian di bidang teknologi canggih. Dengan bergabungnya China dengan WTO akan membawa perubahan yang besar terutama dalam bidang ekonomi. Pemerintah China mengeluarkan beberapa kebijakan baru untuk mengatur investasi asing. kebijakan China ini di sesuaikan dengan komitmen China setelah masuk WTO terutama menyangkut kebijakan perjanijian TRIMs untuk mendorong investasi asing masuk ke negara China. Tujuan dari China menerapkan TRIMs adalah agar negara yang ingin

menanamkan modalnya di China semakin meningkat, karena perjanjian TRIMs memberikan keleluasaan kepada investor untuk melakukan investasi, dan hal ini di penuhi oleh China dengan menerapkan beberapa kebijakan yang tidak bertentangan dengan perjanjian TRIMs. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di China.

Pembentukan Zona Ekonomi Khusus, dengan membuka wilayah pesisir terlebih dahulu dan kemudian membiarkan perekonomian yang terbuka di wilayah ini memberikan daya dorong untuk membuka wilayah-wilayah pedalaman. Sekaligus diharapkan dapat memainkan peranan yang penting dalam menyerap teknologi dari luar negeri dan investasi Asing. China membuka ZEK di propinsi Shenzen di Guangzhou yang berhadapan dengan Hongkong, Shantou dan Xiamen berhadapan dengan Taiwan, dan Zhuhai yang berbatasan dengan Macao. Kemudian pemerintah China membuka daerah lainnya seperti Shanghai dan pulau Hainan.(Tajena dan Mackerras, 2001:2003).

Masuknya perusahaan-perusahaan asing ke China menstimulus perusahaan-perusahaan domestik untuk berkembang. Perusahaan-perusahaan yang berada di China bahkan telah disejajarkan dengan perusahaan-perusahaan papan atas dunia. China sangat menyadari sebagai negara berkembang (yang sudah pasti kekurangan modal untuk membangun negaranya) mendatangkan modal asing adalah pilihan terbaik untuk mengoptimalkan potensi negerinya. China dapat mengarahkan investor asing untuk berinvestasi pada industri-industri yang berorientasi ekspor dan yang dapat melakukan transfer teknologi.

(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/12/02/02434465/Arus.Modal.Asing.dalam.Persaingan.Global, diakses tanggal 9 Desember 2010).

Pemerintah China juga berusaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya secara perlahan, yaitu dengan membuat suatu kebijakan di beberapa sektor industri yang mendukung masuknya penanam modal asing dengan membuat peraturan yang ketat terkait dengan transfer teknologi, dimana pemberian izin berinvestasi hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan multinasional yang mau melakukan transfer teknologi dan mengabaikan perusahaan yang tidak mau melakukan transfer teknologi. Tidak hanya sampai di situ pemerintah China juga membuat suatu kebijakan yang mempermuda para investor dalam menanamkan modalnya terutama dalam masalah perijinan dan memberikan keringanan pajak kepada investor asing yang menanamkan modalnya diwilayah pesisir dan pedalaman China.

Selain itu pemerintah China juga mengijinkan investor asing untuk mendirikan dan mengoperasikan berbagai perusahaan dengan prinsip pasar yaitu tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat, keringanan pajak yang diberikan kepada investor asing yang menanamkan modalnya diwilayah pesisir dan pedalaman China, serta keringanan pajak yang diberikan kepada investor asing yang menanamkan modalnya diwilayah pesisir dan pedalaman China. Hal ini tentu saja memacu negara dari luar untuk menanamkan modalnya di China hal ini terbukti dari kenaikan investasi asing selama beberapa tahun terakhir. Kebijakan yang diterapkan pemerintah China yang mendukung masuknya investasi asing ditambah dengan produktifitas tenaga kerja yang diakui diseluruh

dunia telah menjadikan China sebagai negara yang diminati bagi para investor asing. Tahun 2004, China berhasil menarik investasi langsung asing US$ 60,6 miliar dan 500 perusahaan terbesar dunia hampir seluruhnya melakukan investasi di China.

Dengan demikian, kehadiran modal asing di negeri tersebut memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan nilai tambah bagi perekonomian domestik. Reformasi ekonomi telah memberi peningkatan terhadap ekonomi China dan menjadikan perusahaan-perusahaan China menjadi lebih kompetitif. Arus FDI ke China didominasi oleh negara-negara Asia. Tercatat sebesar 60 persen dari total FDI ke China berasal dari negara-negara seperti Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Arus FDI dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Selama lebih dari dua dekade, pertumbuhan ekonomi terus-menerus meningkat secara menakjubkan. Angka pertumbuhan terus stabil dari tahun-ketahun, ditandai dengan derasnya arus investasi langsung asing atau FDI dan menguatnya posisi China dalam tatanan perekonomian dan perdaganganKekuatan ekonomi China yang tumbuh sebesar 9,9% pada tahun 2005 telah melesat melebihi sebagian besar negara Eropa bahkan mengambil alih peran Jepang sebagai pedagang tingkat dunia**.**(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/12/02/02434465/Arus.Modal .Asing.dalam.Persaingan.Global diakses tanggal 5 desember 2010)

1. Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional

merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

2. Organisasi Internasional adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang didirikan oleh anggota-anggotanya yang terdiri dari negara-negara atau badan-badan non pemerintah yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk mencapai suatu tujuan"(Parthiana, 1987:1).
3. Kerjasama Internasional merupakan akibat dari adanya Hubungan Internasional dan karena bertambah kompleksnya kehidupan manusia didalam masyarakat internasional" (Kartasasmita, 1997:9).
4. "Perdagangan Internasional terdiri dari kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan yang di lakukan oleh perusahaan multinational cooperation untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, tenaga kerja, teknologi dan merk dagang"(Robbok, 1995 : 3).

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan diatas, peneliti memaparkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi China menerapkan TRIMs?
2. Upaya apa yang di lakukan China untuk menarik investor malalui mekanisme TRIMs

3. Bagaimana perkembangan investasi di China setelah menerapkan TRIMs?
4. Kendala-kendala apa yang di hadapi China dalam menerapkan TRIMs?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang penelitian dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini akan membahas variabel-variabel yang berkaitan dengan Pengaruh Regulasi *World Trade Organization* (WTO) *Trade Related Investment Measures* terhadap investasi asing di China. Dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah penerapan *Trade Related Investment Measures* WTO di China, dan yang menjadi variabel dependennya adalah Peningkatan Investasi Asing di China. Kurun waktu yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah tahun 2002 hal tersebut di putuskan karena pada tahun tersebut China telah resmi menjadi anggota WTO, dan tahun 2006 investasi yang masuk ke negara China cukup besar mencapai 60,02 miliar dolar.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, guna memudahkan pembahasan yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka peneliti merumuskan masalah dan penelitian skripsi ini sebagai berikut**:**

”Bagaimana Pengaruh Penerapan *Trade Related Invesment Measures* (TRIMs) WTO Terhadap Investasi Asing di China*”?*

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang di dasarkan pada kepentingan serta motif-motif individual maupun kolektif. Adapun tujuan peneiti dalam studi hubungan internasional, khususnya dalam membahas skripsi adalah:

a. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi China menerapkan TRIMs WTO
b. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan China dalam meningkatkan investasi asing di China mengacu pada *Trade related Invesment Measures* WTO.
c. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh *Trade Related Invesment Measures* WTO terhadap investasi asing di China.
d. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi China dalam menerapkan *Trade Related Invesment* WTO.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pengembangan studi
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang berpedoman pada metode teknik, sekaligus mengimplementasikan ilmu pengetahuan penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana strata (S-1) pada Program Studi Ilmu

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.

1.4 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.4.1 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Pada kenyataannya Hubungan Internasional tidak terbatas hanya pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu dengan kelompok kepentingan, sehingga negara tidak selalu sebagai aktor utama tetapi merupakan aktor yang rasional yang dapat melakukan hubungan melewati batas negara. berikut:

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Bidang-bidang yang mencakup hubungan internasional meliputi keseluruhan interaksi politik, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya antara aktor negara maupun non negara (Viotti & Kauppi, 1999: 483).

Untuk dapat memahami aktifitas dan fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional, maka dikembangkan studi Hubungan Internasional

yang memiliki tujuan dasar mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor-aktor internasional baik aktor negara maupun non negara, dalam interaksi internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisasi internasional (Mas'oed, 1989: 31-32).

Menjalin suatu interaksi antar negara tidak lepas dari politik luar negeri, dimana pada hakekatnya politik luar negeri bertujuan untuk meraih *national interest* yang ingin dicapai oleh suatu negara diluar batas negaranya. Hal ini diungkapkan oleh Prawira Saputra R. Sumpena, dalam bukunya *Politik Luar Negeri Indonesia* sebagai berikut:

> "Politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan nasional yang semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi pada tujuan-tujuan lingkungan ekologi. Respon tersebut mempunyai latar belakang dengan persepsi, pengalaman, kekayaan alam serta kebudayaan politik yang biasanya di manifestasikan sebagai falsafah bangsa dan di akomodasikan dalam konstitusi" (Sumpena, 1985:2).

Teori hubungan internasional memiliki fokus pada studi mengenai penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menunjang terjadinya kerjasama. Teori-teori kerjasama dan juga teori-teori tentang konflik, merupakan basis pentingnya bagi teori hubungan internasional yang komprehensif (Dougherty&Pflatzgraff, 1997: 418).

> "Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan (Dougherty & Pflatzgraff, 1997: 418)".

Dalam menjalankan hubungan internasional tidak hanya antar negara dengan negara saja atau individu dengan negara tetapi juga antara negara dan organisasi internasional. Karena keberadaan organisasi internasional telah diakui keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Organisasi internasional dapat diartikan sebagai ikatan formal yang melampaui batas-batas wilayah nasional yang ditetapkan untuk membentuk suatu mesin kelembagaan agar dapat memudahkan kerjasama di antara pihak yang terkait dalam berbagai bidang. Organisasi internasional sebagai aktor internasional dianggap memberikan keuntungan terhadap negara, dimana ia berperan aktif didalamnya.

Leroy Bennet dalam buku *International Organization, Principle and Issue* mengungkapkan bahwa: "Fungsi utama dari organisasi internasional adalah untuk memberikan makna dari kerjasama yang dilakukan antara negara-negara dalam satu area, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan untuk negara-negara yang terlibat didalamnya (Leroy, 1995:3).

Selain itu, organisasi internasional juga harus berfungsi bagi negara-negara anggotanya. Menurut Bennet dalam buku *Internasional Organization, Principle, and Issue,* fungsi organisasi internasional adalah:

1. Menyediakan sarana kerjasama antarnegara, yang mana kerjasama tersebut menyediakan manfaat bagi semua anggotanya.
2. Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah, agar area akomodasi dapat dieksplorasi dengan mudah terutama ketika muncul suatu permasalahan (Bennet, 1995:3)

Menurut Soeprapto dalam bukunya Hubungan Internasional, terdapat dua kategori organisasi internasional, yaitu:

1. Organisasi antar pemerintah/ IGO (*Inter Governmental Organization*), anggotanya adalah pemerintah atau instansi pemerintah suatau negara. Secara resmi kegiatan IGO berkaitan dengan masalah-masalah konflik, krisis dan penggunaan kekerasan yang banyak menyita perhatian masyarakat internasional karena ada keinginan untuk menghindari atau setidaknya memperkecil intensitasnya.
2. Organisasi non pemerintah/ NGO (*Non Governmental Organization*), terdiri dari kelompok-kelompok agama, budaya, teknologi, dan ekonomi (Soeprapto, 1997: 364-365).

Salah satu kajian utama dalam hubungan internasional adalah organisasi internasional. Posisi organisasi internasional dalam studi hubungan internasional semakin tinggi dengan adanya aliran pluralisme yang menempatkan organisasi internasional sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional, selain individu dan aktor negara tentunya.

> "Organisasi Internasional adalah suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama di antara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi dan sosial, serta bidang lainnya. Organisasi internasional modern, mulai muncul lebih dari satu abad yang lalu di negara barat, yang berkembang di abad ke-20, yaitu di jaman kerjasama internasional. Dua jenis organisasi internasional yang dikenal antara lain, organisasi publik antara dua negara atau lebih, serta organisasi swasta yang lebih dikenal dengan organisasi non-pemerintahan (NGO). (Kamus Hubungan Internasional, 1999: 271)

Dalam memberikan definisi organisasi internasional, perlu juga diperhatikan makna dari dua kata, yaitu internasional dan organisasi, Clive Archer mencoba memberikan penjelasan mengenai organisasi internasional dengan melihat arti dari tiap-tiap kalimat:

> "Organisasi internasional berasal dari dua kata yaitu organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna, *pertama, intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan antarwakil resmi dari negara-negara yang berdaulat. *Kedua,* aktivitas antar individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan transnasional. *Ketiga,* hubungan antara suatu cabang pemerintahan disuatu negara (seperti: departeman pertahanan) dengan suatu cabang pemerintahan di suatu negara lain (seperti : badan pertahanan atau badan intelegen) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut *transgovernmental.* Ketiga hubungan ini termasuk dalam hubngan internasional. (perwita dan yani : 92 : 2005).

Studi ekonomi politik kontemporer telah berkembang luas dimana dimensi ekonomi dan politik telah melibatkan analisis faktor internal dan eksternal dalam perumusan politik luar negeri negara-negara di dunia. Hal demikian dipahami karena studi mengenai politik luar negeri pun telah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada politik dan ekonomi internasional. Dengan tradisi politik luar negeri yang melibatkan teori-teori ekonomi politik akan memaparkan situasi integrasi komprehensif maksimalisasi perjuangan yang dikejar oleh politik luar negeri suatu negara (Ikbar, 2007:7-13).

Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yng berubah seperti sekarang ini maka perdagangan harus memainkan peranan penting. Richard rosecrance memaparkan betapa besar kekuatan yang dapat di wujudkan suatu bangsa melalui kemampuan dagangnya. Kegiatan perdagangan mampu

menggantikan ekspansi wilayah dan perang militer sebagai kunci pokok menuju kesejahteraandan kerjasama internasional.

Robbok menjelaskan perdagangan internasional sebagai berikut :

> "Perdagangan internasional terdiri dari kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan yang di lakukan oleh perusahaan multinational cooperation untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, tenaga kerja, teknologi dan merk dagang"(Robbok, 1995 : 3).

Perdagangan internsional berpengaruh besar terhadap perekonomian seluruh dunia. menurut Ricardo dalam buku *The Principle of Political Economy and Taxation* adalah : "Perdagangan internasional merupakan stimulasi bagi pertumbuhan lewat perluasaan pasar bagi produsen domestik bertambahnya kesempatan pembagian kerja serta di perkenalkannnya teknologi baru"(Ricardo, 1990 : 11).

David Ricardo menarik kesimpulan:

> "Dalam suatu sistem perdagangan bebas setiap negara secara alamiah mengkhususkan modal dan tenaga kerjanya pada pekerjaan pekerjaan yang paling menguntungkan bagi usaha mengejar keuntungan individu ini sangat terkait dengan kebaikan bagi semua secara universal. Dua negara dapat menarik keuntungan dari perdagangan timbal balik bahkan jika salah satu diantaranya lebih efisien daripada yang lain dalam memproduksi barang" (protomo), (didalam Arifin, 2007:19)

Spesialisasi produksi suatu negara dalam kondisi tertentu dilandasi oleh "keunggulan komparatif" yang dimiliki negara tersebut. Keunggulan komparatif tersebut berasal dari dari perbedaan kemampuan teknologi antar negara. Ricardo meyakini bahwa semua negara akan mendapat keuntungan dari perdagangan internasional. Keuntungan itu bahkan juga diperoleh oleh

negara yang mempunyai kemampuan teknologi lebih rendah secara mutlak (absolut) disemua sektor ekonomi daripada negara mitra dagangnya.

Teori J.S Mill berpendapat bahwa:

> "Suatu negara akan mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu bila negara itu memiliki keungulan komparatif terbesar dan akan impor barang tertentu bila negara tersebut memiliki kerugian komparatif atau komparatif terendah(Mill, 2004:57).

Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini. Sejak tahun 1948-1994 sistem GATT memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi. Adapun penjelasan penjelasan mengenai WTO dalam Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT/WTO menurut Hatta adalah sebagai berikut :

> "WTO adalah suatu organisasi Internasional yang mengawasi perdagangan internasioanal yang secara teratur memeriksa pengaturan perdagangan para anggota secara individual, dan juga WTO merupakan konsultan manegemen bagi perdagangan dunia"(Hatta, 1998 : 90).

Berdasarkan definisi tersebut maka WTO salah satu contoh organisasi internasional yang harus dapat menjaga keamanan dalam perdagangan internasional. Kecenderungan suatau negara untuk melakukan tindakan terjadi hubungan dengan negara-negara lain, guna memenuhi kebutuhannya hingga tercapainya suatau kemakmuran bangsa. Untuk memenuhi tuntutan ekonomi sangat dibutuhkan kerjasama.

Adapun penjelasan penjelasan mengenai WTO dalam Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT/WTO menurut Hatta adalah sebagai berikut :

> "WTO adalah suatu organisasi Internasional yang mengawasi perdagangan internasioanal yang secara teratur memeriksa pengaturan perdagangan para anggota secara individual,dan juga WTO merupakan konsultan manegemen bagi perdagangan dunia"(Hatt, 1998 : 90).

GATT mulai di rundingkan sejak tahun 1947 mulai di berlakukan oleh 23 negara yang pertama-tama menandatanganinya pada tanggal 1 januari 1948. Sejak itu pula GATT berperan sebagai lembaga yang menggerakkan perundingan-perundingan guna mewujudkan suatu perdagangan dunia yang bebas dan adil.

Penjelasan lebih lanjut WTO adalah :

> "Sebuah badan internasional dari negara-negara yang berpartisipasi secara suka rela dan menyetujui aturan perdagangan antar negara. WTO menjalankan persetujuan-persetujuan yang di tanda tangani oleh seluruh negara di dunia, menyediakan peraturan legal bagi perdagangan internasional.Tujuannya membantu mengarahkan bisnis dari para penyedia barang dan jasa,ekportir dan importir.Tujuan utama WTO adalah membantu arus perdagangan sebebas mungkin, menyediakan forum negoisasi perdagangan dan penyelesain sengketa"(http://www.wto.org./english/thewto-e/whatis-e/wto04.htm).

Menurut Soedrajat Djiwandono dalam bukunya Perdagangan dan Pembangunan, di jelaskan bahwa :

> "WTO memiliki prinsip dan aturan perdagangan multilateral yang pada dasarnya menyangkut 3 hal pokok, yakni :
>
> 1. Prinsip resiprositas atau timbal balik, artinya perlakuan yang di berikan suatu negara anggota kepada negara lain,harus diimbangi pula oleh perlakuan yang sama oleh negara lain ke mitra dagangnnya tersebut.
> 2. Prinsip non-diskriminasi, atau di kenal dengan *most favoured nation* (MFN), yakni jika kita mengistimewakan suatu negara, maka negara lain pun harus di istimewakan.

3. Prinsip transparansi artinya kebijaksanaan yang di lakukan harus transparan dan dapat di ketahui oleh mitra dagangnya"(Djiwandono, 1992 :98).

Seperti halnya di jelaskan dalam buku *Ekonomi Internasional* menurut R.E.A Mamoer sebagai berikut :

> "Tujuan ekonomi internasional adalah unntuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan ekonomi internasional adalah kerjasama bantu–membantu antar bangsa dan antar negara, dengan adanya kerjasama ini maka kebutuhan yang tidak dapat dapat dipenuhi didalam negeri dapat di penuhi oleh negara lain" (Mamoer, 1947 : 1).

Proses globalisasi yang mendorong perubahan pada aspek ekonomi telah turut serta dalam mendorong terciptanya interdepedensi. Adanya ketergantungan yang semakin terpacu ini daam kehidupan bernegara menunjukkan bahwa adanya suatu kepentingan bersama yang ingin diwujudkan. Sikap pragmatis China dalam pergaulan internasional membuat China harus menerima dan terlibat dalam ekonomi pasar dunia. perdagangan berkembang secara teori dan praktek sebagai reaksi terhadap kebijakan merkantilisme.

Kondisi perekonomian China yang pesat menjadi pertimbangan strategis bagi negara-negara maju dalam melihat China secara keeluruhan, karena adanya kekhawatiran barat, dengan bangkitnya ek0nomi China sebagai suatu kekuatan ekonomi dunia dikawasan Asia Timur. Sejalan dengan pemikiran tersebut menurut T. May Rudy dalam bukunya *Sejarah Diplomasi dapat dijelaskan sebagai berikut :*

"pertumbuhan perekonomian China mempersembahkan gabungan pandangan dari spesialisasi terkemuka dalam berbagai bidang yang perlu

diketahuioleh para pengambil keputusan diseluruh dunia, entah dalam bisnis, profesi, keuangan, media massa, diplomasi ataupun politik dalam mengevaluasi pertumbuhan China dan potensinya dimasa depan" (Rudy, 1999:80).

Usaha penanaman modal (investasi diarahkan untuk meningkatkan kinerja industri besar maupun kecil, serta menambah lapngan pekerjaan. Pengertian investasi menurut Paul A. Sumelsondan W.D. Nordhaus dalam bukunya *Ekonomi Makro*, bahwa :'investasi merupakan penanaman modal yang bersal dari luar negeri. Modal berupa dana, jasa (sepertitransortasi pinjaman dan dana)"(1998: 512).

Adapun pengertian investasi itu sendiri menurut M.L Jingan dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Pembangunan dan perencanaan adalah sebagai berikut: investasi adalah setiap usaha pada setiap sektor-sektor ekonomi tertentu dengan maksud untuk menghasilkan benefit return pada masa-masa mendatang, sedangkan bantuan lain adalah dalam bentuk modal maupun teknik dari salah satu pihak lain dengan didasari maksud-maksud tertentu, maksud ekonomi, moral, kemanusiaan, politik, militer dan gabungan daripadanya" (Jingan, 1988, 411).

Penanaman modal asing sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, investasi mmbantu industrialisasi dalm membangun modal ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, tidak hanya membawa mesin dan uang tetapai juga membawa ketrampilan teknik.

Semenjak China membuka dirinya terhadap dunia internasional, China kebanjiran investasi dari luar negeri walaupun cakupannya terbatas.

Kehadiran investasi asing jadi salah satu bagian dari Teori Deng Xioping. Menurut Wu Jie, teori ini memformulasikan, China dapat maju jika mau membuka diri terthadap dunia luar, terbuka terhadap teknologi dan investai. Secara prinsip, teori ini bertentangan dengan anggapan, China bisa berdiri dalam menghadapi kekuatan kaum kapitalisme

1.4.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut **:**

"Jika China menerapkan *Trade Related Invesment Measures* WTO seperti pembentukan zona ekonomi khusus, Transfer teknologi, pengurusan perijinan yang mudah maka akan meningkatkan investasi asing di China"

1.4.3 Definisi Operasional

Untuk memperjelas pengertian masing-masing variabel yang akan diukur baik variabel bebas *(independent variabel),* maupun variabel terrgantung *(dependent variabel)* dibawah ini akan dijelaskan definisi operasi onal variabel-variabel tersebut, sebagai berikut:

1. Perjanjian TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan. Kesepakatan TRIMs dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus kegiatan

perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan investasi antar negara.

2. WTO adalah suatu Organisasi Internasional yang mengawasi perdagangan internasioanal yang secara teratur memeriksa pengaturan perdagangan para anggota secara individual, dan juga WTO merupakan konsultan managemen bagi perdagangan duniaInvestasi Asing adalah merupakan pembentukan modal yang dilakukan oleh swasta asing ke suatu negara tertentu. Bentuknya dapat berupa cabang perusahaan multinasional, lisensi, manajemen, perusahaan patungan, dan transfer teknologi.
3. Zona Ekonomi Khusus adalah Pembukaan Zona Ekonomi di kawasan-kawasan tertentu dimana kepemilikan swasta dan investasi asing disahkan di kawasan-kawasan ini. Fungsi ZEK tersebut adalah sebagai pusat pengetahuan tentang pengembangan teknologi. Dengan fokus kepada satu zona ekonomi, diharapkan dapat meminimalisir biaya pembangunan.
4. Transfer Teknologi adanya pengalihan ilmu pengetahuan dari negara maju terhadap negara berkembang untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.
5. pengurusan perijinan yang mudah keringanan pajak yang diberikan kepada investor asing yang menanamkan modalnya diwilayah pesisir dan pedalaman China.

1.5 Metodologi Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data.

1.5.1 Metodologi Penelitian

Dalam kegiatan ini, penulis menggunakan Metode deskriptif Analitis, yaitu pemecahan masalah yanng dilakukan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode ini berusaha mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kilas peristiwa pada masa sekarang.

Dalam metode ini pula dipelajari masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung. Selain itu juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam hal ini adalah menggambarkan dan menganalisa situasi mengenai lingkungan global secara sistematis, faktual, juga menganalisa kecenderungan-kecenderungan yang muncul karena masalah tersebut.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Studi Kepustakaan atau *Library Research,* dengan mengumpulkan data dan informasi berdasarkan literature

atau referensi, yang didapat dari berbagai sumber seperti buku-buku, majalah, surat kabar, artikel, dan fasilitas situs internet.

1.6 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Besar No. 69, Bandung
2. Perpustakaan Universiras Komputer Indonesia Jl. Dipatiukur No. 112 Bandung
3. Perpustakaan Universitas Parahyangan Bandung Jl. Cimbuleuit Bandung.
4. Kedutaan Besar China Jl. Mega Kuningan No.2 Jakarta Selatan 12950
5. Kementerian Perdagangan Jl. Rasunan Said no. 312 Jakarta.

1.6.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan Februari 2011, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian						
		Bulan						
		Agus 2010	Sep 2010	Okto 2010	Nop 2010	Des 2010	Jan 2011	Feb 2011
1	Pengajuan Judul							
2	Usulan Penelitian							
3	Seminar Usulan Penelitian							
4	Bimbingan							
5	Pengumpulan Data							
6	Sidang							

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I : Penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan keperluan penelitian, secara sistematis penulisan ini ditulis sebagai berikut; Latar Belakang Penelitian Identifikas Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Latar Belakang Penelitian, Permasalahan, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data, Metodologi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka. Dimana dalam bab ini peneliti menjelaskan teori-teori dan konsep-konsep yang akan menjadi landasan dalam meneliti permasalahan sesuai dengan judul yang diteliti diantaranya Organisasi Internasional, kerjasama Internasional, Perdagangan Internasional, Landasan Perdagangan Internasional, Manfaat Perdagangan internasional, Faktor Pendorong Perdangan Internasional, Investasi. Investasi Tidak Langsung *(Portofolio*), Industri.

Bab III : Objek Penelitian. Latar Belakang, Tujuan, Sejarah Perjalanan GATT Menuju WTO, Putaran-putaran perundingan, Persetujuan-persetujuan WTO, Struktur WTO, Prinsip-Prinsip Dasar WTO, Latar belakang negoisasi TRIMS, Latar belakang negoisasi TRIMS, Negoisasi

TRIMS dan Putaran Uruguay, Perjanjian WTO mengenai TRIMs, Arti Penting Perjanjian TRIMs, Gambaran Umum Tentang China, Keanggotaan China Dalam WTO, Kebijakan Ekonomi Luar Negeri China

Bab IV : Hasil Penelitian. Dalam bab ini berisikan Latar Belakang China Menerapkan TRIMs, Kebijakan Pintu Terbuka *(Open Door Policy)*, Keanggotaan China Dalam WTO, Kebutuhan China akan Investasi Asing, Upaya-upaya yang Dilakukan China untuk menarik investasi asing melalui mekanisme TRIMs, Pembentukan Zona Ekonomi Khusus, Transfer Teknologi, Prosedur Berinvestasi yang Mudah, Kebijakan Ekonomi Masa Kepemimpinan Jiang Zemin, Perekonomian China dibawah Kepemimpinan Hujintao, Perkembangan investasi di China setelah menerapkan TRIMs, Investasi Asing di China, Negara-Negara Penanam Modal di China, Kendala-Kendala yang Dihadapi China Dalam Menerapkan TRIMs, Masalah Pencemaran lingkungan, Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, Masalah Kependudukan.

Bab V : Penutup. Dalam bab ini berisikan Kesimpulan, Saran, Saran Metodologis, Daftar Pustaka.